

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku.

- Abdullah Sulaeman, *Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. Jakarta: Jala Permata Aksara, 2010.
- Abdurrahman, *Masalah Hak-Hak Atas Tanah dan Pembebasan Tanah di Indonesia*. Bandung: Alumni, 1983.
- Abdurrahman, *Masalah Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Pembebasan Tanah di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
- Achmad Rubaie, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. Malang: Bayu Media Publishing, 2007.
- Arie. S. Hutagalung, *Seputar Masalah Hukum Tanah*. Jakarta: LPHI, 2005.
- Benhard Sihombing, *Pengadaan tanah untuk pembangunan, regulasi, kompensasi, penegakan hukum*. Jakarta: Margaretha Pustaka, 2011.
- Friedman dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Gunanegara, *Rakyat Dan Negara Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*. Jakarta: Tata Nusa, 2008.
- Imam Koeswahyono, *Melacak Dasar Konstitusional Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Bagi Umum*. 2008.
- John Salindeho, *Masalah Tanah Dalam Pembangunan*. Sinar Grafika, Jakarta: Sinar Grafika, 1988.
- Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing, 2006.
- Kusnoe, M., *Catatan-catatan terhadap Hukum Adat Dewasa ini*. Surabaya: Airlangga Univ. Press,
- Lieke Lianadevi Tukgali, *Fungsi Sosial Hak Atas Tanah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. Jakarta: Kertas Putih Communication, 2010.

Maria SW Soemardjono, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi Dan Implementasi*. 2005

Maria SW Soemardjono, *Antara Kepentingan Pembangunan dan Keadilan "Forum Diskusi Alternatif"*. Yogyakarta: Universitas Adma Jaya, 1994. .

M. Solly. Lbs, *Diktat Kuliah Teori Hukum*. 2006

R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Bina Cipta, 1987.

Soedharyo Soimin, *Status Hak dan Pembebasan Tanah*. Jakarta : Sinar Grafika, 1993.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2008.

Syafruddin Kalo, *Kapita Selekta Hukum Pertanahan Studi Tanah Perkebunan Di Sumatera Utara*. Medan : USU Press, 2005.

Syafruddin Kalo, *Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*.

Tatit Januar Habib, *"Pelaksanaan Penetaan Ganti Kerugian dan Bentuk Pengawasan Panitia Pengadaan Tanah pada Proyek Pembangunan Terminal Bumiayu"*, Tesis Universitas Diponegoro, Semarang, 2007.

B. Peraturan Undang-Undang

UUD 1945 Amandemen Keempat.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Operasi Militer Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Tanah dan Benda-bendayang Ada Diatasnya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah BagiPembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang

Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembanguna Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (PerKaBPN) Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 jo Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

C. Internet

[http://pengurusan – hat. Blog spot. Com /2008/08/ hak menguasai negara. Html.](http://pengurusan-hat.blogspot.com/2008/08/hak-menguasai-negara.html)
Diakses 29 - 03 – 2010.

<http://sekolahparalegal.blogspot.com/2012/11/arogansi-pemerintahan-kotapadang-dalam.html> diposkan 9 November 2012 oleh Rudi Harmono

<http://www.harianhaluan.com/index.php/berita/haluan-padang/39723-pemko-tantang-warga-bungus-lewat-hukum> diposkan Jumat 17 April 2015 oleh Koran Haluan Padang